

FILSAFAT DAN KONSEP NEGARA MARXISME

Oleh: Harsa Permata¹

Abstract

Marxism is an ideology that based on dialectical and historical materialism philosophy. According to Marxism philosophy, matter is the mode of production in society. Marxism concept of dialectic is different from Hegelian. While the Hegelian dialectic is based on idea or spirit, Marxism dialectic is based on motion of matter as the mover of dialectics. In every process of dialectics there are contradictions that always exist. Communist society is the end of the historical dialectical society. Communist society will exist in reality after the withering away of the state because the state, according to Marxism philosophy, is a manifestation of class antagonism.

Keywords: Marxism, dialectic, matter, contradiction, capitalism, communism.

A. Pendahuluan

Marxisme sebagai sebuah pandangan filsafat sudah banyak diperbincangkan dalam berbagai diskursus ilmiah di seluruh dunia. Ironisnya di Indonesia, secara hukum, Marxisme masih dijadikan sebagai ideologi terlarang lewat TAP MPRS No. XXV/1966. Walaupun dalam perubahannya ditambahkan kata-kata “*ke depan diberlakukan dengan berkeadilan dan menghormati hukum, prinsip demokrasi dan hak asasi manusia*” (id.wikipedia.org), tetap saja ideologi Marxisme belumlah sebuah ideologi yang legal untuk didiskusikan baik dalam dunia akademis maupun dalam kehidupan sehari-hari. Padahal dalam sejarah para pendiri negara mempelajari Marxisme. Bahkan Bung Karno meng-Indonesia-kannya dengan konsep Marhaenisme. Ia juga mengakui peranan Marxisme dengan poros NASAKOM yang digagasnya. Poros NASAKOM ini adalah manifestasi dari gagasannya tentang penyatuan ideologi Nasionalisme, Islamisme dan Marxisme (Soekarno, 1964:4-5).

¹ Mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Hal inilah yang menjadi alasan pentingnya penggalian kembali pemikiran Marxisme untuk mengetahui secara lebih utuh apa yang menjadi inti dari pemikiran Marxisme. Karena Marx sendiri mengatakan bahwa sosialisme yang dikemukakannya adalah sosialisme ilmiah. Dengan mengkaji konsep Marxisme secara lebih utuh, maka penulis mengharapkan bahwa segala prasangka-prasangka yang tidak ilmiah terhadap Marxisme bisa dikesampingkan. Selain itu juga diharapkan, tulisan ini bisa mengubah pandangan negatif dari sebagian masyarakat Indonesia terhadap konsep Marxisme.

B. Filsafat Materialisme Dialektika Historis Sebagai Dasar Pemikiran Marxisme

Pandangan Marxisme tentang negara merupakan antitesa dari pandangan liberalisme tentang negara yang menganggap bahwa negara adalah kontrak sosial untuk perdamaian. Basis analisis Marxisme adalah materialisme dialektika historis, atau dengan kata lain berdasarkan kenyataan material yang berkembang melalui proses historis. Karena itu Marxisme melihat bahwa perdamaian akan ada ketika negara lenyap. Tahapan ini oleh Marxisme disebut sebagai tahapan masyarakat komunis.

Berbeda dengan filsafat Idealisme Hegel yang menganggap bahwa kekuatan yang menggerakkan sejarah adalah roh dunia atau akal dunia, Marx melihat bahwa perubahan material itulah yang mengubah sejarah. Perubahan material menciptakan hubungan-hubungan rohaniah yang baru. Marx secara khusus menekankan bahwa kekuatan ekonomi dalam masyarakatlah yang menciptakan perubahan dan menggerakkan sejarah yang bergerak maju (Gaarder, 2001:426).

Konsep sejarah Marx (Materialisme Dialektika Historis, sebenarnya berasal dari kritiknya terhadap dialektika Hegel yang bersifat idealis. Hegel memahami sejarah sebagai gerak ke arah rasionalitas dan kebebasan. Roh semesta berada di belakang sejarah dan ia mendapatkan objektivitas di dalamnya. Hegel berbicara tentang roh objektif, roh sebagaimana ia mengungkapkan diri dalam kebudayaan-kebudayaan, dalam moralitas-moralitas bangsa-bangsa, dan institusi-institusi.

Menurut Hegel, semua yang nyata adalah rasional dan semua yang rasional adalah nyata. Namun demikian, 'yang nyata' menurut Hegel berbeda dengan 'yang nyata' menurut pandangan kaum empiris. Menurutnya, 'fakta' dalam pandangan kaum empiris adalah

irrasional. Bagi Hegel, roh adalah sesuatu yang abadi, homogen, dan tak terbatas, yang merupakan sebuah identitas murni (Russell, 1955:763). Kenyataan menurut Hegel adalah sebuah proses pemikiran atau ide dan ia menyamakan istilah ide ini dengan roh (Hardiman, 2004:178-179). Kenyataan dalam filsafat Hegel adalah keseluruhan yang tak terpisahkan, “yang benar adalah keseluruhan” (Osborne, 2001 : 109).

Bagi Hegel ada tiga tingkatan filsafat roh. Pertama adalah roh subyektif yang merupakan tingkatan terendah. Dalam konsep roh subyektif individu masih terbungkus oleh alam tetapi telah berusaha melepaskan diri. Roh dalam tingkatan ini, menurut Hegel, telah berpindah dari kondisi “berada di luar dirinya” menuju kondisi “berada bagi dirinya”. Tingkatan berikutnya, roh subyektif yang manifes di dalam diri individu tadi memasuki tingkatan yang lebih tinggi, dan obyektif, yaitu di dalam keluarga, masyarakat, dan negara (Hadiwijono, 1980:103).

Menurut Hegel, roh obyektif mendapat ungkapan paling kuat dalam negara. Karena negara mempunyai kehendak, ia dapat bertindak. Dengan demikian, negara mengungkapkan roh semesta, ia merupakan “perjalanan Allah dalam dunia”. Dalam filsafat sejarah, Hegel menunjukkan bagaimana manusia semakin menyadari kebebasannya dan semakin mengorganisasikan dirinya dengan menjunjung tinggi kebebasannya (Suseno, 2001:59).

Puncak dialektika roh dalam filsafat Hegel adalah roh absolut. “Yang Absolut adalah Yang Ada”, sementara “Yang Ada” adalah roh (Hardiman, 2004:192). Roh absolut (ide absolut) merupakan sintesis dari roh subyektif (ide subyektif) dan roh obyektif (ide obyektif). Roh absolut menurut Hegel adalah *pure thought* (pikiran murni) yang berpikir tentang dirinya sendiri (Russell, 1955:761).

Sejarah dunia menurut Hegel adalah sebagai berikut, “Dan Ruh tersebut bisa kita ketahui di dalam istilah spiritual atau melalui pemikiran, bahwa Ruh itu sendiri yang menyatakan dirinya dalam semua perbuatan dan kecenderungannya terhadap masyarakat, yang membawa dirinya pada aktualisasi diri... Untuk membuat jalan yang lain bagi Ruh, selanjutnya sejarah dunia masyarakat yang lain, masa sejarah dunia yang lain. Transisi dan hubungan seperti ini mengarahkan kita pada hubungan timbal balik keseluruhan terhadap konsep sejarah dunia. Sekarang kita harus mengkaji lebih dekat dan memberikan sebuah presentasi pada ruh. Sejarah dunia secara umum, dengan demikian, merupakan perkembangan Ruh dalam

waktunya, sebagaimana alam yang merupakan perkembangan Idea di dalam Ruang-nya”(Hegel, 2003:117-118).

Sementara materialisme Marx berasal dari kritiknya terhadap materialisme Feuerbach, inti materialisme Feuerbach adalah kritiknya terhadap agama. Dasar kritik agama Feuerbach adalah bahwa bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tetapi sebaliknya Tuhan merupakan produk dari imajinasi manusia. Menurut Feuerbach, agama hanyalah sebuah proyeksi manusia. Allah, malaikat, surga, neraka adalah bukan merupakan kenyataan, melainkan hanya merupakan gambar yang dibentuk manusia tentang dirinya sendiri. Jadi, agama adalah khayalan manusia belaka. Agama bagi Feuerbach tidak lebih dari proyeksi esensi manusia (Suseno, 2001:68). Tuhan adalah pikiran manusia yang pertama dan kemudian dilanjutkan dengan nalar, manusia dan yang terakhir adalah pikiran. Menurut Feuerbach, yang dianggap manusia sebagai tuhan itu adalah esensi dirinya sendiri (Plekhanov, 2002:21-22).

Menurut Marx, sejarah bersifat material, artinya sejarah mengacu pada kondisi-kondisi fundamental eksistensi manusia. Metode materialis Marx inilah yang membedakan pandangannya dari pandangan Hegel. Obyek studinya adalah terhadap kehidupan sosial ekonomi manusia yang nyata dan terhadap pengaruh pandangan hidup manusia yang sebenarnya pada cara berpikir dan merasanya. Berkebalikan dengan filsafat Jerman, yang menurut Marx turun dari langit ke bumi, filsafat Marx, menurutnya, justru naik dari bumi ke langit. Dengan kata lain, Marx tidak berangkat dari apa yang sedang dibayangkan, dipahami manusia sekarang ini, juga bukan dari apa yang telah diceritakan, dipikirkan atau dibayangkan, dan dipahami manusia pada zaman dahulu menuju manusia dalam bentuk fisik. Marx berangkat dari manusia yang nyata dan aktif dan berdasarkan proses kehidupannya yang nyata (Fromm, 2001:14).

Kenyataannya, materialisme Marx berbeda dengan materialisme lainnya yang punya kecenderungan untuk melihat alam sebagaimana layaknya sebuah mesin, atau dengan kata lain menuhankan materi dan tidak melihat materi dalam prosesnya. Marx menentang materialisme mekanis dan borjuis seperti itu (Fromm, 2001:13). Materi di sini mengacu pada kondisi sosial ekonomi manusia, seperti yang dikemukakan Marx,

“Dalam produksi sosial kehidupan mereka, manusia memenuhi hubungan-hubungan tertentu yang mutlak dan tidak tergantung pada kemauan mereka; hubungan-hubungan ini sesuai dengan tingkat perkembangan tertentu tenaga-tenaga produktif materialnya. Jumlah seluruh hubungan-hubungan produksi ini merupakan struktur ekonomi masyarakat, dasar nyata di mana di atasnya timbul suatu bangunan atas yuridis dan politis dan dengannya bentuk-bentuk kesadaran sosial, politik dan spiritual pada umumnya. Bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka tetapi sebaliknya, keadaan sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka” (Suseno, 2001:142).

Dalam ungkapan lain, Fromm mengatakan bahwa Marx mendeskripsikan metode historisnya sendiri secara sangat ringkas, yaitu:

“Cara di mana manusia memproduksi alat-alat penghidupannya pertama-tama tergantung pada sifat-sifat dari alat aktual yang ditemukan manusia dalam eksistensinya dan yang harus dibuatnya kembali. Mode produksi ini tidak bisa dianggap begitu saja sebagai reproduksi eksistensi fisik individu-individu ini. Tetapi mode produksi lebih sebagai sebuah bentuk aktivitas individu-individu yang jelas, sebuah mode kehidupan manusia yang pasti”(Fromm, 2001:15).

Jadi materi dalam pandangan Marx adalah bagaimana cara manusia menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Cara produksi terdiri dari hubungan-hubungan produksi (hubungan kerjasama atau pembagian kerja antara manusia yang terlibat proses produksi) dan tenaga-tenaga produktif (kekuatan-kekuatan yang dipakai oleh masyarakat untuk mengerjakan dan mengubah alam, yang terdiri dari alat-alat kerja, manusia dengan kecakapan masing-masing, dan pengalaman-pengalaman dalam produksi (teknologi) (Suseno, 2001:143).

Menurut seorang Marxis, Mao Tse-Tung, perkembangan atau gerak dari materi adalah bersifat dialektis, yang digambarkannya ke dalam “kontradiksi”. Mao Tse-Tung mengatakan,

“Hukum kontradiksi di dalam hal ihwal, yaitu hukum kesatuan dari hal-hal yang berlawanan, merupakan hukum terpokok dari dialektika materialis...Kontradiksi

intern selalu ditemukan dalam setiap realitas, karena itulah timbul gerak dan perkembangan realitas. Kontradiksi di dalam realitas inilah yang menjadi sebab fundamental dari perkembangannya, sedangkan kesalinghubungan dan kesalingberpengaruhannya dengan realitas yang lain merupakan sebab sekunder”(Mao, 2001: 37-42).

Menurut pandangan dialektika materialis, perubahan-perubahan alam terutama disebabkan oleh perkembangan berbagai kontradiksi internal dalam alam itu sendiri. Perubahan-perubahan masyarakat pun terjadi karena adanya perkembangan kontradiksi-kontradiksi internal dalam masyarakat itu sendiri, yaitu kontradiksi antara tenaga-tenaga produktif dengan hubungan-hubungan produksi, kontradiksi di antara kelas-kelas, dan kontradiksi antara yang baru dengan yang lama. Perkembangan kontradiksi-kontradiksi inilah yang mendorong maju masyarakat dan mendorong proses perubahan masyarakat lama menjadi masyarakat baru (Mao, 2001:44).

Untuk ini Engels juga menjelaskan, “Dialektika, yang disebut dialektika obyektif, berlaku di semesta alam, dan yang disebut dialektika subyektif, pikiran dialektika, hanyalah pencerminan/pantulan gerak melalui pertentangan-pertentangan yang menyatakan dirinya di mana saja di dalam alam, yang lewat konflik terus-menerus dari yang bertentangan-tentangan (berlawan-lawanan), dan akhirnya mereka saling beralih – yang satu menjadi yang lainnya atau menjadi bentuk-bentuk yang lebih tinggi, menentukan kehidupan alam” (Engels, 2005:255).

Adapun hukum-hukum dialektika menurut Engels adalah “transformasi kuantitas menjadi kualitas berbeda dengan pandangan dunia mekanika. Perubahan kuantitatif mengubah kualitas. Tuan-tuan terhormat itu tidak pernah menduga hal itu!... Sifat sebenarnya dari determinasi-determinasi hakekat diungkapkan oleh Hegel sendiri: pada hakekatnya segala sesuatu itu relatif (misalnya, positif dan negatif yang bermakna hanya di dalam hubungan mereka, tidak masing-masing berdiri sendiri...identitas mengandung perbedaan dalam dirinya sendiri (A=Non A)...Positif dan negatif itu ekuivalen (setara)...negasi dari negasi, yaitu bahwa yang berkontradiksi-sendiri tidak menyudahi dirinya menjadi ketiadaan abstrak, tetapi pada pokoknya hanyalah menjadi negasi dari isi tertentu/khususnya, dst”(Engels, 2005:255-269).

Jadi inti dari dialektika, terutama dialektika materialis, adalah kontradiksi atau pertentangan. Inilah yang kemudian menjadi faktor penyebab munculnya perkembangan (gerak). Tetapi selain bertentangan juga terjadi kesatuan karena kesatuan dan pertentangan adalah hukum dasar alam semesta.

“Hukum kesatuan dari yang bertentangan merupakan hukum dasar alam semesta. Hukum ini berlaku di mana-mana, dalam dunia alam, dalam masyarakat manusia, dan dalam pemikiran manusia. Segi-segi yang bertentangan dalam kontradiksi bersatu maupun berjuang terhadap satu sama lain, dan dengan demikian mendorong semua hal ihwal berbeda dalam alam, demikian juga kontradiksi. Dan satu hal dalam gejala tertentu, kesatuan yang bertentangan adalah bersyarat sementara dan dalam keadaan transisi, dan maka itu relatif, sedangkan perjuangan antara segi-segi yang berlawanan adalah mutlak” (Engels dalam Haryadi, 2000:109).

Senada dengan ini, Mao juga menambahkan bahwa gerak dalam realitas objektif dan subjektif manusia tercipta karena adanya kontradiksi antar unsur yang saling menegasikan dan menyisihkan. (Mao, 2001:95). Kontradiksi dalam dialektika materialis adalah bersifat umum atau mutlak, artinya kontradiksi adalah suatu hal yang harus ada untuk adanya sesuatu. Keumuman atau kemutlakan kontradiksi mempunyai arti rangkap. Pertama, kontradiksi selalu ada di dalam proses perkembangan realitas. Kedua, di dalam proses perkembangan setiap realitas terdapat gerak kontradiksi dari awal sampai akhir (Mao, 2001:49).

Selain bersifat umum (mutlak), kontradiksi juga bersifat khusus (relatif). Artinya, bentuk atau gerak apapun di dalamnya selalu mengandung kontradiksinya sendiri yang khusus. Kontradiksi khusus ini merupakan hakikat khusus yang membedakan sebuah realitas dari realitas lainnya (Mao, 2001:56).

Hubungan antara keumuman kontradiksi dengan kekhususan kontradiksi adalah hubungan antara watak umum dengan watak individual dari kontradiksi. Yang dimaksudkan dengan watak umum ialah bahwa kontradiksi terdapat dalam setiap proses dan berlangsung dalam setiap proses dari awal sampai akhir, gerak, realitas, proses, pikiran – semuanya adalah kontradiksi. Kontradiksi adalah hal yang pasti ada dalam realitas, menyangkal kontradiksi dalam realitas berarti menyangkal segala sesuatu. Namun watak umum ini

terkandung dalam watak setiap individu; tanpa watak individual tidak akan ada watak umum. Semua watak individual itu berada dengan syarat tertentu dan untuk sementara, karena itu ia adalah relatif (Mao, 2001:79).

Selain itu dalam proses perkembangan realitas yang rumit ditemukan banyak kontradiksi dan di antaranya pasti terdapat salah satu yang merupakan kontradiksi pokok (yang keberadaannya dan perkembangannya menentukan atau mempengaruhi keberadaannya dan perkembangannya menentukan atau mempengaruhi keberadaan kontradiksi-kontradiksi yang lain). Misalnya, dalam masyarakat kapitalisme kontradiksi pokok adalah antara borjuasi dan proletariat (Mao, 2001:80). Dalam sejarah manusia terdapat pertentangan antara kelas-kelas sebagai manifestasi spesifik dari kontradiksi (Mao, 2001 : 108).

Karl Marx dalam buku **Manifes Partai Komunis** juga mengemukakan hal yang sama. Konsep sejarah Marx adalah terlihat dari paragraf pertama dari buku itu.

“Sejarah dari semua masyarakat yang ada sekarang ini adalah sejarah perjuangan kelas. Orang merdeka dan budak, *patrisir* dan *plebejer*, tuan bangsawan dan hamba, tukang ahli dan tukang pembantu, pendeknya penindas dan yang tertindas senantiasa ada dalam pertentangan satu dengan yang lain, melakukan perjuangan yang setiap kali berakhir dengan penyusunan kembali masyarakat umumnya atau dengan sama-sama binasanya kelas-kelas yang bermusuhan” (Marx, 1964 : 50).

Karena selalu ada pertentangan dalam masyarakat (dari mulai komune primitif, zaman perbudakan, feodalisme, kapitalisme dan terakhir sosialisme, baru pada masyarakat komunisme ketika negara melenyap, kontradiksi kelas juga melenyap), masyarakat akan terus-menerus berkembang. Pergantian dari masyarakat lama ke masyarakat baru selalu berdasarkan revolusi, karena kekuatan produktif (manusia dan alat kerja) adalah bersifat revolusioner, sedangkan hubungan produksi berkembang sangat lambat. Kontradiksi antara kekuatan produktif dan hubungan produktif terjadi karena hubungan produktif sudah tidak lagi mampu merespon kekuatan produktif. Karena itu meletuslah revolusi. Revolusi yang kemudian melahirkan hubungan produksi baru (Pembebasan, Nomor 17 Maret 2000: 5).

Filsafat Marxisme mendasarkan diri pada materi, yang dalam hal ini adalah kondisi sosial dan ekonomi atau untuk lebih spesifiknya disebut corak produksi yang terdiri dari hubungan produktif dan kekuatan produktif. Setiap proses perkembangan sejarah selalu tidak bisa lepas dari “kontradiksi” antara kedua komponen corak produksi ini.

Inilah yang membedakan antara konsep materialisme dialektika historis Marxisme dengan dialektika Hegel atau Materialisme Feuerbach. Kalau menurut Hegel, dasar dialektika sejarah adalah ide atau roh mutlak, sementara materialisme Feuerbach melihat manusia terlepas dari kondisi sosial, Tuhan, dan agama yang bagi Feuerbach adalah proyeksi individual manusia.

Untuk gerak materi, Marxisme sepakat dengan Hegel, yaitu bersifat dialektis. Inti dari dialektika sendiri adalah kontradiksi. Untuk berkembangnya sesuatu maka kontradiksi adalah mutlak diperlukan, selain itu kontradiksi sesuatu juga bersifat khusus, itulah yang membedakannya dengan yang lainnya.

Sejarah juga bukan hanya sejarah para tokoh tetapi adalah sejarah masyarakat, lebih khususnya adalah sejarah kelas-kelas yang saling berkontradiksi (bertentangan) dan antara hubungan produksi dan kekuatan produktif. Masyarakat manusia adalah sebuah kolaborasi yang berawal secara historis dalam perjuangan untuk keberadaan dirinya dan keberlangsungan generasinya. Karakter sebuah masyarakat ditentukan oleh sistem ekonominya. Sistem ekonomi tersebut ditentukan oleh penggunaan buruh produktif oleh masyarakat itu. Setiap rezim sosial hingga sekarang telah mendatangkan keuntungan luar biasa bagi kelas penguasa. Dengan alasan itu, jelas bahwa rezim-rezim sosial tidak abadi. Mereka muncul secara historis, dan lalu menjadi penghambat kemajuan lebih lanjut. “Semua yang muncul patut dihancurkan”. Tetapi tak ada kelas penguasa yang secara sukarela dan damai mau begitu saja turun dari kekuasaannya (Trotsky dkk, 2002: 214-215) untuk itulah perjuangan kelas tertindas yang terorganisasi adalah jawabannya. Inilah inti dari teori Materialisme Dialektika Historis.

C. Konsep Negara Marxisme

Marxisme melihat negara bukan sebagai manifestasi dari perdamaian atau alat untuk mendamaikan. Marxisme melihat negara sebagai produk dari kontradiksi kelas dalam masyarakat yang tak

terdamaikan. Negara timbul ketika kontradiksi-kontradiksi kelas secara objektif tidak dapat didamaikan (Lenin, 2000:5).

Selain itu konsep negara Marxis tidak mengenal pemisahan kekuasaan seperti yang dikemukakan John Locke (*trias politica*). Konsep negara Marxis adalah penghapusan parlementarisme dan institusi borjuasi lainnya (seperti tentara reguler yang digantikan dengan rakyat bersenjata). Untuk ini kaum sosialis belajar dari pengalaman komune Paris yang mengeluarkan dekrit pertama, penghapusan tentara reguler dan menggantikannya dengan rakyat bersenjata. Setelah itu komune paris juga melakukan pencabutan fungsi politik polisi dan menempatkannya di bawah komune yang sewaktu-waktu dapat diganti, pencabutan fungsi politik alat-alat kekuasaan material pemerintahan lama, alat penindas spiritual, yaitu pemuka agama yang menolak perubahan (Lenin, 2000:66).

Menurut Marx, komune bukan badan legislatif, melainkan badan pekerja yang sekaligus membuat dan melaksanakan undang-undang (Lenin, 2000:73). Jadi fungsi komune adalah fungsi rangkap legislatif sekaligus eksekutif. Lembaga-lembaga perwakilan tetap dipertahankan, hanya saja parlementarisme yang korup akibat dari pembagian kerja antara legislatif dan eksekutif serta kedudukan dan hak istimewa bagi anggota-anggotanya digantikan dengan badan yang menjalankan sendiri undang-undang mereka, memeriksa sendiri apa hasilnya dalam kehidupan dan bertanggung jawab langsung pada pemilih-pemilihnya (Lenin, 2000:78). Fungsi yudikatif di sini dijalankan langsung oleh rakyat sebagai pemilih, yang bisa mengangkat dan memberhentikan anggota pemerintahan.

Selain berbeda dengan konsep negara Liberal, konsep negara Marxis juga berbeda dengan pandangan Hegel tentang negara, yang menganggap negara merupakan bentuk ide tertinggi dan karena itu tidak mungkin diatur oleh pandangan manusia. Negara adalah hasil akhir dari roh absolut. Negara dalam pandangan filsafat Hegel adalah sebuah realitas ide moral, sejalan dengan konsep awalnya bahwa semua “yang nyata adalah rasional”, dan “negara adalah rasional dalam dan untuk dirinya sendiri”. Artinya bahwa negara adalah roh moral, yaitu sebuah kehendak substansial yang terlihat jelas pada dirinya sendiri, yang bisa berpikir dan mengetahui dirinya sendiri (Russell, 1955:767).

Marxisme melihat bahwa negara adalah realisasi dari bentuk keterasingan kegiatan politik manusia. Penjelasan mengenai panda-

ngan Marxisme tentang negara selengkapnya diulas oleh Engels dalam kata pengantar **Civil War in France**.

“Menurut konsepsi banyak filsuf, negara dianggap sebagai “realisasi dari ide”, atau kerajaan Tuhan di muka bumi...dan sebuah ruang tempat kebenaran abadi dan keadilan bisa diwujudkan....Dalam kenyataannya, bagaimanapun, negara tak lain dari mesin penindas suatu kelas kepada kelas lainnya, ini terjadi di republik demokratis seperti juga terjadi pada negara monarki” (Engels dalam Haryadi, 2000:101).

Selain itu, Marxisme juga melihat bahwa negara adalah alat dari kelas yang dominan (berkuasa) untuk menindas kelas-kelas lainnya. Karena itu kemudian dalam negara ada satuan khusus orang-orang bersenjata dan penjara yang gunanya tak lain dan tak bukan adalah untuk menjaga dan mempertahankan kekuasaan yang ada. Negara adalah alat untuk menghisap kelas tertindas, karena itu selazimnya yang menguasai negara adalah kelas yang memiliki dominasi secara ekonomi politik.

Marxisme membongkar selubung-selubung ideal yang melingkupi konsep negara Liberal dan negara versi Hegelian. Seperti halnya filsafat materialisme dialektika historis, yang melihat bahwa kenyataan adalah sejarah kontradiksi-kontradiksi material, maka negara menurut Marxisme adalah alat peredam kontradiksi-kontradiksi tersebut (khususnya kontradiksi kelas).

Karena negara bukanlah alat perdamaian, maka untuk terciptanya perdamaian negara kemudian akan melenyap sejalan dengan melenyapnya kontradiksi kelas. Ini terjadi setelah melewati fase transisi, yaitu negara sosialisme (kediktatoran proletariat). Masyarakat ketika negara melenyap disebut Marx sebagai masyarakat komunis atau merupakan tahap tertinggi dari tahap-tahap ekonomi (proses produksi) masyarakat. Dalam tahap inilah kehidupan berjalan menjadi “masing-masing memberi menurut kemampuannya, masing-masing menerima menurut kebutuhannya” (Marx dalam Haryadi, 2000 : 134).

Proses melenyapnya negara adalah melalui revolusi dengan kekerasan, yaitu kelas buruh menjadi kelas yang berkuasa. Kelas buruh dan kelas tertindas lainnya merebut negara dan mengubah negara borjuasi menjadi negara proletariat dengan sistem kediktatoran proletariat, yaitu proses ekonomi (proses produksi) dan proses

politik (sistem pemerintahan) dikuasai oleh kaum buruh bersenjata dan dijaga oleh mereka.

“Proletariat akan menggunakan supremasi politiknya untuk merebut secara paksa, sedikit demi sedikit, seluruh modal kaum borjuis, memusatkan semua peralatan produksi di tangan negara, yaitu kaum proletar yang diorganisasikan sebagai kelas yang berkuasa; dan menambah jumlah kekuatan-kekuatan produktif secepat mungkin negara, yaitu kaum proletar yang diorganisasikan sebagai kelas yang berkuasa, yaitu kediktatoran proletariat” (Lenin dalam Stepanova, 2004:32).

Sesuai dengan ini Engels juga mengatakan,

“Proletariat merebut kekuasaan negara dan pertamanya mengubah alat-alat produksi menjadi milik negara. Tetapi dengan ini ia mengakhiri dirinya sendiri sebagai proletariat, dengan ini ia mengakhiri segala perbedaan kelas dan antagonisme kelas, dan bersama itu juga mengakhiri negara sebagai negara. Masyarakat yang ada sejak dulu hingga sekarang yang bergerak dalam antagonisme-antagonisme kelas memerlukan negara, yaitu organisasi kelas penghisap untuk mempertahankan syarat-syarat luar produksinya; artinya terutama untuk mengekang dengan kekerasan kelas-kelas terhisap dalam syarat-syarat penindasan (perbudakan, perhambaan dan kerja upahan) yang ditentukan oleh cara produksi yang sedang berlaku. Negara adalah wakil resmi seluruh masyarakat, pemusatan masyarakat dalam lembaga yang nampak, tetapi negara yang berupa demikian itu hanya selama ia merupakan negara dari kelas yang sendirian pada zamannya mewakili seluruh masyarakat; pada zaman kuno ia adalah negara dari warga negara pemilik budak; pada Zaman Tengah, negara dari bangsawan feodal; pada zaman kita, negara dari borjuasi. Ketika negara pada akhirnya sungguh-sungguh menjadi wakil seluruh masyarakat, ia menjadikan dirinya tidak diperlukan lagi. Segera setelah tidak ada lagi satu kelas pun dalam masyarakat yang perlu ditindas, segera setelah lenyapnya, bersama dengan dominasi kelas, bersama dengan perjuangan untuk

eksistensi perorangan yang dilahirkan oleh anarki produksi masa kini... Negara tidaklah dihapuskan, *ia melenyap*. Atas dasar ini harus dinilai kata-kata “negara rakyat bebas” – kata-kata yang untuk sementara mempunyai hak hidup dalam hal agitasi, tetapi yang pada akhirnya tidak beralasan secara ilmiah – serta harus dinilai juga tuntutan dari apa yang dinamakan kaum anarkis supaya negara dihapuskan seketika” (Engels dalam Lenin, 2000:21-23).

Ini adalah fase transisi menuju proses melenyapnya negara atau komunisme. Kediktatoran proletariat adalah titik transit ke penghapusan perbedaan kelas secara umum. Fase kediktatoran proletariat berarti juga adalah fase penghancuran struktur ekonomi politik borjuasi. Karena tugas revolusi kaum proletar adalah menghancurkan dan mendobrak mesin negara lama, guna penyempurnaannya (Stepanova, 2004:55).

Mengenai melenyapnya negara, Lenin berkata,

“Hanya dalam masyarakat Komunis, ketika perlawanan kaum kapitalis sudah dipatahkan secara pasti, ketika kaum kapitalis sudah lenyap, ketika tidak ada kelas-kelas (yaitu tidak ada perbedaan di antara anggota-anggota masyarakat dalam hal hubungan mereka dengan alat-alat produksi sosial), barulah “negara lenyap dan dapat berbicara tentang kebebasan”. Baru pada waktu itulah mungkin dan akan dilaksanakan demokrasi yang sungguh-sungguh utuh, sungguh-sungguh tanpa pengecualian. Dan baru pada waktu itulah demokrasi akan mulai melenyap disebabkan oleh kenyataan sederhana, bahwa setelah dibebaskan dari perbudakan kapitalis, dari kengerian yang tak terhitung banyaknya, kebuasan, ketidakmasukakalan, dan kekejian kapitalis, orang berangsur-angsur akan terbiasa mentaati peraturan-peraturan elementer dari pergaulan umum yang telah dikenal berabad-abad dan diulang-ulang selama beribu-ribu tahun dalam petatah-petitih, mentaatinya tanpa kekerasan, tanpa paksaan, tanpa penundukan, tanpa aparat khusus untuk memaksa, yang disebut negara” (Lenin, 2000:159).

Penjelasan Marx tentang kediktatoran proletariat adalah sebagai berikut.

“Lama sebelum diriku para sejarawan borjuis telah melukiskan perkembangan sejarah dari pertentangan kelas ini, dan para ekonom borjuis – anatomi ekonomi dari kelas-kelas itu. Hal baru yang kulakukan adalah membuktikan: (1) bahwa eksistensi kelas-kelas hanya erat dengan fakta-fakta, fase-fase historis dalam perkembangan produksi; (2) bahwa perjuangan kelas perlu dipimpin oleh kediktatoran proletariat; (3) bahwa kediktatoran ini sendiri hanya merupakan transisi menuju suatu masyarakat tanpa kelas” (Marx dalam Stepanova, 2004:56).

Fase kediktatoran proletariat disebut juga sebagai sosialisme. Fase ini adalah fase transisi untuk mencapai masyarakat komunisme, yang secara ekonomi bercirikan penguasaan alat-alat produksi secara kolektif, hubungan-hubungan distribusi pasar yang berposisi subordinat (di bawah negara yang demokratis tentunya) yang berdasarkan representasi masyarakat langsung dalam unit-unit teritorial dan produksi. Sosialisme juga ditandai dengan rekonversi ekonomi, yang secara hakikat berarti, pengaturan ulang distribusi tanah, pendapatan dan kredit, pemotongan monopoli swasta, reformasi sistem pajak dan kredit. Pembebanan yang realistis berdasarkan nilai kepemilikan pasar. Pendisiplinan pengumpulan pajak secara tegas (dengan sanksi yang keras bagi pelanggar yang bandel), proteksi terhadap industri-industri yang baru muncul, dan pembukaan perdagangan untuk komoditas-komoditas yang tidak menyaingi produsen-produsen lokal. Pengendalian keuangan yang berfungsi untuk mengeliminasi aktivitas spekulatif para spekulan, penciptaan lapangan pekerjaan umum dan produksi interregional. Dalam bidang politik juga diperlukan suatu modernisasi negara yang berarti desentralisasi administrasi negara dan redistribusi pejabat-pejabat politik yang sebelumnya mempunyai fungsi birokratis yang tidak bermanfaat ke pekerjaan-pekerjaan yang lebih produktif. Dalam bidang pendidikan adalah pembangunan sekolah-sekolah dan perluasan akses pendidikan terhadap seluruh anggota masyarakat (Petras, 2001: 316-325).

Ini adalah bentuk perombakan secara total struktur ekonomi politik borjuasi atau perombakan struktur ekonomi politik yang kapitalistis menjadi lebih berpihak pada kepentingan rakyat atau

buruh dan tani (kelas tertindas). Pada fase ini peran negara masih sangat dibutuhkan. Negara sebagai alat pemaksa (koersif) masih dibutuhkan untuk menindas kembali borjuasi (makna penindasan terhadap borjuasi di sini adalah perlawanan proletariat terhadap borjuasi lewat organisasi yang berbentuk negara). Aparat khusus, mesin khusus untuk menindas, “negara” masih diperlukan, tetapi ini sudah merupakan negara transisional, sudah bukan lagi negara dalam arti kata yang sebenarnya, sebab penindasan terhadap minoritas kaum penghisap oleh mayoritas kaum budak upahan yang kemarin adalah hal yang relatif demikian mudah, sederhana, dan wajarnya, sehingga ia akan meminta pertumpahan darah yang jauh lebih sedikit dari pada penindasan terhadap pemberontakan-pemberontakan kaum budak, hamba, buruh upahan (Lenin, 2000: 161). Fungsi negara, menurut konsep Marxisme, diubah dari institusi yang punya otoritas politik menjadi fungsi-fungsi administrasi sederhana yang menjaga kepentingan-kepentingan masyarakat (Lenin, 2000:106).

Menurut Lenin, negara merupakan sebuah ‘kekuatan penindas yang khusus’, yang dalam masyarakat kapitalis digunakan menindas proletariat, maka kekuatan ini harus diganti dengan kekuatan penindas yang bukan khusus lagi, tetapi menjadi kekuatan umum dari mayoritas rakyat (buruh dan tani) terhadap borjuasi (Lenin, 2000:69). Inilah yang disebut dengan penghancuran ‘negara sebagai negara’, pengambilalihan alat-alat produksi atas nama masyarakat (Lenin dalam Patria, 2003:110).

Setelah fase ini berhasil dilewati dengan baik, idealnya akan terwujud suatu masyarakat tanpa kelas. Tetapi untuk menuju ini haruslah diwujudkan suatu internasionalisme atau suatu sosialisme yang mendunia terlebih dahulu. Seperti yang disampaikan Trotsky,

“Berkenaan dengan tugas-tugasnya yang segera, Revolusi Rusia adalah sebuah revolusi borjuis, tetapi kaum borjuis Rusia anti-revolusioner. Karena itulah kemenangan Revolusi hanya mungkin sebagai sebuah kemenangan kaum proletariat. Lagi pula kaum proletariat yang menang tidak berhenti pada program demokrasi ala borjuis, ia akan terus menuju program sosialisme. Revolusi Rusia menjadi tahap pertama dari revolusi dunia kaum Sosialis” (Trotsky dkk, 2002: 234).

Tanpa internasionalisme ini sangat mustahil bisa terwujud masyarakat tanpa negara atau komunisme. Karena ketika internasio-

nalisme belum terwujud, perkataan Trotsky tentang “revolusi dunia kaum sosialis” adalah berarti pembangunan internasionalisme sosialis. Pada tahap ini negara masih dibutuhkan untuk mempertahankan diri dari serangan kapitalisme internasional. Ketika internasionalisme sosialis telah terwujud maka dengan begitu tahapan masyarakat komunisme akan semakin dekat, ketika inilah (masyarakat komunis) negara tak dibutuhkan lagi.

Revolusi sendiri bermakna suatu pergantian tatanan sosial. Revolusi memindahkan kekuasaan dari tangan-tangan kelas yang telah kehabisan energi kepada kelas lain yang lebih kuat. Berbeda dengan proses-proses alam, sebuah revolusi dibuat oleh manusia dan melalui manusia. Tujuan revolusi adalah untuk menggulingkan kelas yang berkuasa dalam masyarakat (Trotsky dkk, 2002: 215-217). Revolusi bagi Marxisme bermakna sebagai penggulingan rezim borjuasi dan menegakkan kekuasaan kelas proletariat.

Revolusi dalam pandangan Marxisme-Leninisme memerlukan suatu organisasi pelopor yang bernama partai revolusioner, yang berfungsi untuk mempersatukan unsur-unsur revolusioner (Trotsky dkk, 2002: 218). Kepemimpinan partai revolusioner memang dibutuhkan dalam perjuangan pembebasan kelas tertindas menuju revolusi demokratik dan sosialisme. Partai ini akan melenyap seiring dengan melenyapnya negara, karena partai adalah salah satu institusi negara.

Proses pergantian kekuasaan dari kelas penindas ke kelas tertindas ini juga membutuhkan sebuah persatuan internasional dari kaum tertindas yang menyetujui ideologi sosialisme (internasionalisme). Tanpa internasionalisme yang sifatnya sosialis sejati (benar-benar sosialis) maka proses melenyapnya negara (komunisme) akan sulit terwujud. Yang terjadi malah sebaliknya, negara yang pernah sosialis jadi berguguran satu-persatu, beberapa negara sosialis besar, seperti Uni Sovyet dan RRC, beralih menjadi negara yang menganut sistem ekonomi kapitalisme. Ini terjadi karena ketidakmampuan untuk mempertahankan diri dari serangan ekonomi-politik kapitalisme internasional yang sekarang telah bermetamorfosa menjadi globalisasi atau neoliberalisme.

D. Tanggapan Atas Kritik Terhadap Marxisme

Intelektual Liberal memandang bahwa konsep dan praktek politik Marxisme adalah anti kebebasan dan demokrasi. Benarkah itu? Untuk itu mari kita lihat bagaimana kritikan kaum Liberal ter-

hadap praktek politik Marxisme. Seperti kritik yang disampaikan oleh Mitchell Dean tentang praktek otoritarian negara Republik Rakyat China (RRC) yang mengeluarkan kebijakan satu anak, dan pemerintahan Nazi yang melakukan pembersihan rasial. Menurut Mitchell ini adalah gambaran bagaimana pengetahuan manusia diselewengkan dalam pelaksanaan bentuk dari pemerintah yang otoritarian (Dean, 2002:50).

Menarik juga kita lihat adalah bagaimana penggambaran Solzhenitsyn terhadap otoritarianisme Uni Sovyet ketika pemerintahan Stalin.

“Kamp khusus pastilah merupakan salah satu ciptaan kesayangan Stalin di masa tuanya. Setelah melakukan begitu banyak eksperimen dalam hukuman dan re-edukasi, akhirnya ia bisa mendapatkan bentuk hukuman yang sempurna: sebuah organisasi yang ringkas dan terdiri dari orang-orang tanpa wajah yang diwakili angka-angka, yang secara psikologis telah dicerabut dari tanah air yang telah melahirkan mereka, organisasi yang memiliki pintu masuk tapi tidak memiliki pintu keluar, yang hanya melahap musuh-musuh rakyat dan menghasilkan barang-barang industri dan mayat-mayat” (Solzhenitsyn, 2004:583).

Kritikan inilah yang kemudian dijadikan amunisi untuk menyerang sosialisme, Marxisme dan komunisme. Kritiknya adalah pada pemerintahan Sovyet di bawah Stalin, yang memang diragukan sebagai pemerintahan yang menjalankan prinsip-prinsip Marxisme-Leninisme tentang negara sosialis. Mengenai tirani Stalinisme memang itu adalah riil terjadi tetapi mengenai kebenaran apakah Stalin menjalankan prinsip-prinsip sosialisme yang digariskan oleh Marxisme-Leninisme dengan konsisten ini patut kita ragukan.

Sidney Hook yang mewakili kaum Liberal Amerika Serikat juga melancarkan serangkaian kritik terhadap Marxisme. Menurutnya, konsep perjuangan kelas telah runtuh karena kemunculan fenomena seperti kebangkitan kekuatan nasionalisme dan rasisme. Menurutnya, ini mematahkan pernyataan Marx, bahwa “kaum buruh tak punya tanah air”. Ia juga mengkritik konsep negara Marxis yang menurutnya tidak sesuai dengan praktek. Konsep penghapusan kelas untuk menuju melenyapnya negara baginya tidak sesuai dengan praktek Uni Soviet ketika pemerintahan Stalin. Uni Soviet pada pemerintahan Stalin ternyata semakin memperkuat

fungsi negara dan masih mempertahankan alat represi yang bernama polisi. Pemerintahan Uni Soviet di bawah Stalin, menurut Hook, menciptakan kelas penguasa baru yang menindas rakyat Rusia (Hook dalam Bachtiar, 1986:118-119).

Selanjutnya Hook juga berpendapat bahwa kapitalisme bukannya hancur sebagaimana diramalkan Marx melainkan justru berkembang menjadi negara yang makmur, karena perluasan proses demokrasi yang kemudian berpengaruh pada struktur ekonomi masyarakat (Hook dalam Bachtiar, 1986:120). Menurut Hook, kediktatoran proletariat yang dikonsepsikan oleh Lenin bergantung pada kediktatoran partai komunis yang pada prakteknya bergantung pada kediktatoran politbiro yang diakhiri dengan pemerintahan satu orang atau tiran (Hook dalam Bachtiar, 1986: 123-124). Pernyataan Hook ini perlu ditinjau lagi kebenarannya. Apakah benar Lenin mengkonsepkan begitu? Sumbernya apa? Karena jikalau sumbernya tidak jelas maka ini adalah bentuk-bentuk manipulasi akan kebenaran ajaran Marxisme-Leninisme.

Konsep negara Marxisme yang dikemukakan Lenin bisa kita temukan dalam buku **Negara dan Revolusi**, tetapi sekali lagi di sana tidak ada satu pun paragraf, kalimat ataupun kata yang mengemukakan tentang kediktatoran partai komunis yang sifatnya khusus. Yang ada adalah pernyataan Lenin, bahwa kediktatoran proletariat adalah bukan lagi satuan penindas khusus lagi, tetapi adalah satuan penindas umum dari mayoritas rakyat terhadap minoritas borjuasi. Atau juga dengan kata lain, kediktatoran proletariat adalah suatu bentuk organisasi perlawanan proletariat terhadap borjuasi. Hanya saja organisasi ini lebih besar kekuasaannya serta lebih kuat dari organisasi proletariat sebelum merebut negara. Sesuai dengan logika filsafat politik Marxisme, maka organisasi perlawanan proletariat ini (kediktatoran proletariat) akan melenyap seiring dengan melenyapnya negara.

Kritikan Hook hampir sama dengan kritikan Solzhenitsyn terhadap pemerintahan Sovyet di bawah Stalin. Bedanya Hook tidak memberikan sumber-sumber yang jelas tentang konsep Marxisme yang dikritik olehnya. Sidney Hook mengkritik konsep yang diklaimnya sebagai konsep Marxisme-Leninisme tetapi masih perlu diragukan lagi kebenaran dan sumber konsep Marxisme yang dikritiknya tersebut.

Untuk kasus Stalinisme, seorang Marxis yang juga komunis, Leon Trotsky berpendapat bahwa Stalinisme adalah sebuah kenya-

taan sejarah yang bertentangan dengan demokrasi. Stalinisme, menurut Trotsky, bukan menggambarkan kediktatoran proletariat tetapi merupakan reaksi birokrasi yang besar untuk melawan dikta-tor proletariat. Stalinisme ternyata memapankan kembali hak-hak istimewa yang ada dalam masyarakat borjuasi. Stalinisme mengu-bah administrasi sosialis menjadi oligarki Kremlin (Trotsky dkk, 2002: 62-65).

Kesalahan Stalinisme adalah tidak adanya pondasi dasar melenyapnya negara, yaitu penghancuran mesin-mesin negara borjuasi. Stalin tidak menghancurkan mesin-mesin ini. Sebuah revolusi sosialis, menurut Marxisme-Leninisme, harus membubar-kan tentara reguler (Kusumandaru, 2004:297) yang digantikan dengan rakyat tentara. Rakyat tentara adalah model pertahanan negara dengan melibatkan seluruh rakyat dalam fungsi pertahanan, contoh kongkret dari hal ini adalah pertempuran 10 November di Surabaya, Indonesia. Pertempuran Surabaya telah dapat mengge-rakkan rakyat banyak untuk ikut serta, baik secara aktif maupun pasif, dalam perjuangan melawan musuh bersama waktu itu, yaitu tentara Inggris yang melindungi (menyelundupkan) NICA ke wilayah Indonesia. Inilah kesalahan Uni Sovyet di bawah Stalin yang pertama, yaitu tidak dibubarkannya tentara reguler. Yang kedua, adalah tidak dibubarkannya aparat birokrasi. Padahal menurut konsep Marxisme-Leninisme, aparat birokrasi sebagai institusi borjuasi harus dibubarkan dan digantikan dengan aparatus administratif yang ditempati secara bergantian dengan masa jabatan yang sangat pendek (Kusumandaru, 2004: 297).

Kedua hal tersebut merupakan kesalahan dari Stalinisme. Karena itu Uni Sovyet di bawah Stalin adalah bukan negara sosialis. Uni Soviet di bawah Stalin adalah negara borjuasi, atau kapitalisme negara. Kondisi yang menyebabkan terbentuknya negara seperti ini adalah karena krisis yang melanda Rusia paska revolusi dan perang sipil.

Bertrand Russell yang berkunjung ke Uni Sovyet pada tahun 1920 paska revolusi dan di bawah kondisi perang sipil (1918-1921) menyaksikan bagaimana krisis pangan yang terjadi di Rusia dan ini diiringi dengan pemberlakuan jam kerja yang panjang bagi rakyat Rusia dengan fasilitas yang minim. Upah kerja yang rendah sema-kin menambah beban penderitaan yang dialami oleh rakyat Rusia, hari libur juga sangat kurang dan sulit didapat. Penggeledahan oleh polisi terhadap orang yang melakukan wisata (Russell, 1962:43-45).

Tetapi di samping itu ia juga melihat bagaimana kekacauan dan tingkat kejahatan sangat minim, kebebasan berpolitik terjadi, tiap orang bekerja keras, setiap posisi baik itu administrasi dan pemerintahan diisi oleh kalangan intelektual, kualitas seni yang mengagumkan dan bisa dinikmati mayoritas rakyat dengan gratis. Minimnya orang yang mabuk dan pelacuran (Russell, 1962:43).

Kondisi Rusia paska perang sipil kemudian membuat Lenin harus mengeluarkan kebijakan untuk memerangi beragam krisis yang menimpa Rusia. Kebijakan itu bernama NEP (*New Economic Policy*/Kebijakan Ekonomi Baru), yang esensinya adalah pemulihan ekonomi pasar, tetapi hasilnya ternyata memperkuat kembali borjuasi (Kusumandaru, 2004:282). Karena dilanda problem kekurangan orang dalam tubuh pemerintahan, akibatnya kader-kader terbaik *Bolshevik* (partai pelopor revolusi Rusia, artinya mayoritas) banyak berguguran ketika perang sipil melawan aliansi borjuasi eropa (tentara putih) yang ingin menghancurkan revolusi oktober 1917. Karena banyak kader-kader terbaik *Bolshevik* yang gugur inilah maka banyak kaum intelektual yang direkrut untuk mengisi posisi yang lowong di pemerintahan (*soviet-soviet*/dewan-dewan rakyat), setelah sifat birokratik dari intelektual ini disadari maka dilancarkanlah pembersihan di dalam tubuh partai *Bolshevik*. Orang yang kemudian dipercaya untuk menjalankan tugas itu adalah Stalin. Sebaliknya Stalin kemudian memperkuat posisi intelektual di partai. Ia mengisi jabatan-jabatan dalam partai dengan orang-orang yang loyal padanya (yang rata-rata merupakan intelektual). Ketika Lenin stroke pada tahun 1922, Stalin merubah nama partai *Bolshevik* menjadi partai komunis Uni Soviet, dan dia sendiri menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal. Sejak ini Stalin menyingkirkan semua lawan-lawan politiknya, termasuk di dalamnya veteran-veteran *Bolshevik* yang konsisten dan dipercaya oleh Lenin. Lenin sempat menyesali ini semua dan mengindikasikan bahwa Stalin tidak pantas menduduki jabatan sebagai Sekretaris Jenderal, tetapi sudah terlambat (Kusumandaru, 2004:285-287).

Stalinisme muncul dari kondisi krisis yang kompleks yang membuat rakyat Rusia miskin dan kelaparan serta juga tentara merah harus mendapat jatah makan yang cukup agar kuat dalam berperang. Selain itu petugas administrasi negara juga harus mendapat jatah makan yang cukup pula agar roda produksi industri tetap berjalan. Stalin dituntut untuk menyelesaikan problem ini, karena

itulah ia menempuh langkah-langkah yang keras dalam praktek politiknya (Kusumandaru, 2004:289).

Kediktatoran Stalin memang dikarenakan kesalahan yang dibuat oleh Lenin. Namun demikian, tidak adil jika kemudian semua tirani Stalinisme dianggap sebagai representasi dari praktek politik Marxisme-Leninisme. Praktek-praktek yang dilakukan oleh Stalinisme pada kenyataannya sangat bertentangan sekali dengan prinsip-prinsip filsafat Marxisme.

Penguatan tentara reguler dan bukannya penghapusan institusi bersenjata ini, penyelewengan terhadap konsep Dewan Rakyat, yang komposisinya secara konseptual adalah wakil-wakil kaum buruh dan kelas tertindas lainnya yang diakui semata (perwakilan sejati rakyat) serta keputusannya berwatak proletar (mengacu pada komposisi komune Paris) (Engels dalam Lenin, 2000:133). Karena itu bisa dikatakan bahwa negara Uni Soviet adalah negara borjuasi yang mengaku sosialis Marxis, karena satuan penindas khusus masih dipertahankan. Kesalahan seperti ini juga terjadi pada negara-negara kapitalis yang mengaku sosialis lainnya, seperti China, yang terkenal dengan pembantaian Tiananmen.

E. Penutup

Sangat mudah untuk mengkritik Marxisme secara teoritik, karena teori Marx tentang masyarakat komunis sebagai akhir dialektika sejarah belum juga terwujud. Tetapi harus dipahami juga pernyataan Marx dalam **Thesis on Feuerbach**, "*The philosophers have only interpreted the world in various ways; the point is to change it*" (www.marxists.org). Maksud dari pernyataan ini adalah bahwa filsafat Marx lebih menitikberatkan pada praktek. Marxisme bukan hanya tumpukan teori, tetapi adalah sebuah panduan untuk praktek revolusioner.

Sudah banyak kritikan terhadap Marxisme, dari mulai yang tidak bermutu sampai yang bermutu. Yang paling menggelikan adalah kritik terhadap prinsip keadilan sama rasa sama rata, yang pada kenyataannya tidak pernah dikemukakan oleh Marx. Prinsip ini dianggap sebagai ide dasar komunisme, yang kemudian dianalogikan sebagai semua orang mendapat jatah yang sama. Padahal masyarakat komunis menurut Marx adalah masyarakat yang berpola, "*From each according to his ability, to each according to his needs*" (en.wikipedia.org). Distribusi kerja dan hasil berdasarkan prinsip ini adalah bersifat proporsional, bukan

“semua mendapat jatah sama”, seperti yang didengung-dengungkan pengkritik Marxisme. Oleh karena itu, tulisan ini bukanlah sebuah kritik teoritik terhadap Marxisme.

Krisis ekonomi yang terjadi di negara-negara maju, baik di Eropa maupun Amerika, sudah membuktikan kebenaran teori Marx, bahwa kapitalisme akan mengalami krisis. Mengenai metamorfosa kapitalisme dalam setiap krisis yang dialaminya, mungkin belum dijelaskan secara lengkap oleh Marx, walaupun perdagangan bebas sebagai ciri neoliberalisme (bentuk termutakhir kapitalisme) sudah disinggung oleh Karl Marx dalam pidatonya tentang perdagangan bebas tahun 1848 (www.marxists.org).

Pergolakan yang terjadi di berbagai belahan dunia adalah imbas dari krisis yang terjadi dalam tubuh kapitalisme. Misalnya perang penaklukan antara koalisi negara-negara imperialis terhadap negara yang menghambat jalur modal kapitalisme baik di Irak pada tahun 2003 maupun Libya pada tahun 2011. Ini semua sesuai dengan konsep Marxisme tentang kontradiksi material dalam masyarakat.

Untuk kasus Indonesia, Marxisme semenjak Orde Baru berkuasa dijadikan sebagai sosok hantu yang mengerikan sehingga harus dibasmi dengan kekerasan. PKI sebagai manifestasi Marxisme digambarkan sebagai golongan yang sadis, yang telah membunuh beberapa perwira Angkatan Darat, sehingga oleh karena itu pembunuhan terhadap tiga juta kader, simpatisan PKI adalah wajar. Logika yang absurd dan tidak masuk akal.

Untuk itulah maka pemahaman terhadap konsep Marxisme secara ilmiah adalah penting. Karena dengan ini pemahaman terhadap realitas secara utuh bisa terwujud, dan juga agar tidak terjebak pada logika mistis dan absurd yang menyelubungi kebenaran tersembunyi dalam realitas.

F. Daftar Pustaka

Anonim, **Pembebasan**, 2000, No. 17, Edisi Maret.

Bachtiar, H.W., 1986, **Percakapan dengan Sidney Hook tentang 4 Masalah Filsafat, Etika, Ideologi Nasional, Marxisme, Eksistensialisme**, Penerbit Djambatan, Jakarta.

Dean, M., 2002, “Liberal government and authoritarianism” dalam **Economic And Society Journal**, Volume 31 No. 1 February 2002.

- Engels, F., 2005, **Dialektika Alam**, terj. Oey Hay Djoen, Hasta Mitra, Jakarta.
- Fromm, E., 2001, **Konsep Manusia Menurut Marx**, terj. Agung Prihatoro, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Gaarder, J., 2001, **Dunia Sophie**, terj. Rahmani Astuti, Mizan, Bandung.
- Hadiwijono, H., 1980, **Sari Sejarah Filsafat Barat 2**, Kanisius, Yogyakarta.
- Hardiman, B.F., 2004, **Filsafat Modern Dari Machiavelli Sampai Nietzsche**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Haryadi, E., 2000, **Lenin: Pikiran, Tindakan, dan Ucapan**, Komunitas Studi Untuk Perubahan, Jakarta.
- Hegel, G.W.F., 2003, **Filsafat Sejarah**, terj. Win Usuludin dan Harjali, Panta Rhei Books, Yogyakarta.
- Kusumandaru, K.B, 2004, **Karl Marx, Revolusi dan Sosialisme**, Resist Book, Yogyakarta.
- Lenin, W. I., 2000, **Negara dan Revolusi**, terj. Sulang Sahun, FUSPAD (Forum Studi Perubahan dan Peradaban), Yogyakarta.
- Mao,T.T., 2001, **Empat Karya Filsafat**, terj. Sulang Sahun, FUSPAD (Forum Studi Perubahan dan Peradaban), Yogyakarta.
- Marx, K dan Engels, F., 1964, **Manifes Partai Komunis**, terj. Depagitprop CC PKI, Jajasan Pembaruan, Jakarta.
- Osborne, R., 2001, **Filsafat untuk Pemula** (terjemahan Indonesia), Kanisius, Yogyakarta.
- Patria, N dan Arief, A., 2003, **Antonio Gramsci Negara dan Hegemoni**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Petras, J dan Veltmeyer, H., 2001, **Imperialisme Abad 21**, terj. Agung Prihantoro, Kreasi Wacana, Yogyakarta.
- Plekhanov, G., 2002, **Masalah-Masalah Dasar Marxisme**, terj. Ira iramanto, Hasta Mitra, Jakarta.
- Russell, B., 1955, **History of Western Philosophy and its Connection with Political and Social Circumstances from the Earliest Time to the Present Day**, George Allen & Unwin Ltd, London.
- Russell, B., 1962, **The Pratic And Theory Of Bolshevism**, Unwin Books, London.
- Soekarno, 1964, **Di Bawah Bendera Revolusi Jilid I**, Panitya Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, Jakarta.

- Solzhenitsyn, A.I., 2004, **Gulag**, terj. Akhmad Santoso, PT Bentang Pustaka, Yogyakarta.
- Stepanova, E., 2004, **Karl Marx Nabi Kaum Proletar**, terj. Iwan Nurdaya-Djafar, Mata Angin, Yogyakarta.
- Suseno, F.M., 2001, **Pemikiran Karl Marx dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Trotsky, L, Dewey, J, Novack, G., 2002, **Ada Apa Dengan Kita, Moralitas Marxist Versus Liberal**, terj. Siti Farida, Panopticon, Yogyakarta.

Sumber Internet :

- en.wikipedia.org, diakses hari Jum'at tanggal 25 November 2011 pukul 23.05 WIB.
- id.wikipedia.org, diakses hari Jum'at tanggal 25 November 2011 pukul 9.05 WIB.
- www.marxists.org, diakses hari Jum'at tanggal 25 November 2011 pukul 23.00 WIB.